

## ▶ PEMERATAAN PEMBANGUNAN

## RI Harus Benahi Perbatasan

BANTUL—Pemerintah Indonesia dinilai masih memandang sebelah mata daerah perbatasan. Hal ini didasarkan pada data jumlah desa tertinggal di Indonesia sebanyak 5.011, 1.138 di antaranya berlokasi di daerah perbatasan.

Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Gunawan Budiyananto mengatakan tugas besar pemerintah untuk memperbaiki sistem dan juga kesejahteraan masyarakat yang berlokasi di daerah perbatasan. Tujuannya agar negara Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara tetangga.

Gunawan menambahkan bagi sebagian negara, daerah perbatasan merupakan sebuah etalase yang dapat menjaga gengsi antar negara perbatasan. Mereka banyak membenahi daerah perbatasannya dengan sedemikian rupa agar tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain.

"Pembenahan di daerah perbatasan itu biasanya difokuskan pada infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya jelas agar tidak ada intervensi dari negara lain terhadap masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan," kata Gunawan saat *Bincang Sebatik* di Gedung Ar. Fachruddin B lantai lima Kampus Terpadu UMY, Kamis (12/11).

Gunawan juga menyampaikan amanat Peraturan Presiden No.2/2015 tentang

“  
**Pembenahan di daerah perbatasan itu biasanya difokuskan pada infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.”**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) yang menunjukkan kerangka ekonomi makro seharusnya juga ada di daerah perbatasan.

"Namun kenyataannya masih banyak daerah di perbatasan yang terbelakang dalam hal ekonomi dan kesejahteraan," ungkap Gunawan.

Saat ini yang menjadi kendala di daerah perbatasan adalah pendidikan, infrastruktur dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sementara itu, mahasiswa UMY telah sukses menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan selama dua bulan. Pendamping KKN UMY Daerah Tertinggal, Ahmad Ma'ruf mengatakan KKN di daerah perbatasan sangat membantu pemerintah. (*Joko Nugroho*)